



2025



7.0561066666666665S 112.455015E  
109° E  
Jalan Kartini  
Ketapangtelu  
Kecamatan Karangbinangun  
Kabupaten Lamongan  
Jawa Timur  
Altitude:33.8m  
Speed:0.3km/h  
Index number: 537

# LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Risiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan risiko.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk

komitmen dan konsistensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2025 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal- hal yang membutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

## **D. RUANG LINGKUP**

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2025 di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

CONTOH REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

2025

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Pemerintah Kabupaten Lamongan

2025

Pemda : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																			SIMPULAN KUOSIONER CEE						
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35		Modus					
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																					Memadai					
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	3	4	4	2	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	Memadai				
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	3	3	4	4	1	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	Memadai			
3	Terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	3	4	4	3	1	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	Memadai		
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	Memadai		
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																					Memadai					
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Memadai		
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	Memadai		
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	4	3	4	3	2	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	Memadai	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																					Memadai					
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	3	4	4	4	1	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	4	4	3	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
6	Mencana/ksasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	3	4	4	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	Memadai		
7	Mencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	3	3	3	4	1	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	3	3	4	4	1	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	Memadai	
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KESUTUHAN																																					Memadai					
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	Memadai	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	4	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	Memadai

[illegible]

## **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

1. Adanya pegawai yang belum secara tepat mengisi posisi/jabatan. Masih adanya Nilai IP-ASN OPD yang masih rendah dan disebabkan dimensi kompetensi ASN yang rendah
2. Masih perlu dilakukan pembaruan susunan organisasi terhadap pejabat fungsional dan informasi terkait pedoman dalam penyusunannya.

Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Formulir Kertas Kerja**

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Kurang disiplinnya sebagian pegawai dalam mentaati ketentuan kehadiran	Melaksanakan pembinaan secara berkala	Sekretaris	12 Bulan
2	Sebagian jabatan diisi oleh pegawai yang tidak sesuai dengan pendidikannya	Akan dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi	Sekretaris	12 Bulan
3	Nilai SAKIP masih perlu ditingkatkan	Akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan
4	Masih Kurangnya Penjelasan Terkait Pejabat Fungsional	Akan dilaksanakan sosialisasi terkait penjelasan pejabat fungsional	Sekretaris	12 Bulan
5	Masih adanya jabatan yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan	Akan dikoordinasi dengan instansi terkait	Sekretaris	12 Bulan
6	Kinerja pegawai sebagian masih kurang	Melaksanakan pembinaan secara berkala	Sekretaris	12 Bulan
7	Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah telah terpenuhi dengan cukup baik dan perlu ditingkatkan	Akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan
8	Hubungan kerja dengan instansi pemerintah terkait terpenuhi dengan cukup baik dan perlu ditingkatkan	Akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala	Kepala Dinas	12 Bulan



### **BAB III**

#### **PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

##### **A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN**

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memperhatikan dan mengacu pada casecading Misi III RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana” dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Sehingga tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah “Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan penanggulangan bencana
2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah

##### **B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO**

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi kedalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Tabel Matriks Resiko Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	<b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>
Nama OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian	<b>2025</b>
Periode yang Dinilai	<b>2025</b>
Tujuan Strategis	Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana
Urusan Pemerintahan	
OPD yang dinilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan Strategis Pemerintah	Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana
Sasaran	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana 2. Manajemen Internal Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Presentase Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.25.39.07.01	Kepala Pelaksana BPBD	Kurangnya alokasi anggaran dan komitmen opd dalam pembentukan desa tangguh bencana	Internal / Eksternal	C	Masih banyak desa yang di daerah rawan bencana belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Masyarakat
2	Presentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	RSO.25.39.07.02	Kepala Pelaksana BPBD	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Internal / Eksternal	C	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana menurun	Masyarakat
3	Presentase Pemulihan Pasca Bencana yang Dilaksanakan	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.25.39.07.03	Kepala Pelaksana BPBD	Kurangnya alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Internal / Eksternal	C	Perhitungan dan bantuan pasca bencana kurang optimal	Masyarakat
4	Nilai SAKIP BPBD	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.39.07.04	Kepala Pelaksana BPBD	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Internal	C	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi	BPBD

Tabel Matriks Resiko Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Tujuan Strategis	
Sasaran strategis OPD	
Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.25.39.07.01	Pejabat Fungsional	Minimnya anggaran yang dialokasikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana	Eksternal	C	Layanan penanggulangan bencana yang diterima masyarakat tidak optimal	Masyarakat
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelaksanaan	Resiko Kemitraan: Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.25.39.07.02	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui daerah rawan bencana	Eksternal	C	Menurunya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	Masyarakat
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelaksanaan	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.25.39.07.03	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Minimnya SDM yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Internal	C	Kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat	Masyarakat

4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelaksanaan	Resiko Fraud: Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.25.39.07.04	Kabid Kedaruratan dan Logistik Bencana	Keterbatasan sarana dan prasarana respon cepat darurat bencana	Internal	C	Menurunya tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon cepat yang dilakukan BPBD	Masyarakat
5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan	Terhambatnya proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.25.39.07.05	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana	Internal / Eksternal	C	Keterlambatan penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana	Masyarakat
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja secara Tepat Waktu	Pelaksanaan	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.39.07.06	Sekretaris	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar lintas bidang terhadap pelaporan serta movev pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan	Internal / Eksternal	C	Pencapaian pelaporan yang tidak tepat waktu	BPBD
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.39.07.07	Sekretaris	Kurangnya Pemahaman ASN terkait dokumen laporan pertanggungjawaban	Internal	C	Mempengaruhi Kualitas Laporan Pertanggungjawaban yang kurang lengkap	BPBD
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.39.07.08	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN terhadap Dokumen Kepegawaian	Internal	C	Pencapaian hasil kurang maksimal	BPBD
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.39.07.09	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Internal	C	Pencapaian hasil kurang maksimal	BPBD
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Perencanaan	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.39.07.10	Sekretaris	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Internal	C	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan	BPBD
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.25.39.07.11	Sekretaris	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Pencapaian hasil kurang maksimal	BPBD
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO.25.39.07.12	Sekretaris	Kurangnya kedisipinan dan kesadaran dalam melaksanakan tugas	Internal	C	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	BPBD
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO.25.39.07.13	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN dalam memelihara sarana dan prasarana kantor	Internal	C	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	BPBD

## C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

**Formulir Kertas Kerja**  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
<b>Risiko Strategis OPD</b>							
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.25.39.07.01	11	Kepala Pelaksana BPBD	Kurangnya alokasi anggaran dan komitmen opd dalam pembentukan desa tangguh bencana	Masih banyak desa yang di daerah rawan bencana belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	RSO.25.39.07.02	8	Kepala Pelaksana BPBD	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana menurun
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.25.39.07.03	6	Kepala Pelaksana BPBD	Kurangnya alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Perhitungan dan bantuan pasca bencana kurang optimal
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.39.07.04	10	Kepala Pelaksana BPBD	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Kurang efektif dan efisiensi nya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi
<b>Risiko Operasional OPD</b>							
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.25.39.07.01	7	Pejabat Fungsional	Minimnya anggaran yang dialokasikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana	Layanan penanggulangan bencana yang diterima masyarakat tidak optimal
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Resiko Kemitraan: Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.25.39.07.02	10	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui daerah rawan bencana	Menurunnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.25.39.07.03	10	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Minimnya SDM yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Resiko Fraud: Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.25.39.07.04	8	Kabid Kedaruratan dan Logistik Bencana	Keterbatasan sarana dan prasarana respon cepat darurat bencana	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon cepat yang dilakukan BPBD
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terhambatnya proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.25.39.07.05	5	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana	Keterlambatan penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.39.07.06	6	Sekretaris	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar lintas bidang terhadap pelaporan serta movev pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan	Pencapaian pelaporan yang tidak tepat waktu
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.39.07.07	7	Sekretaris	Kurangnya Pemahaman ASN terkait dokumen laporan pertanggungjawaban	Mempengaruhi Kualitas Laporan Pertanggungjawaban yang kurang lengkap
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.39.07.08	8	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN terhadap Dokumen Kepegawaian	Pencapaian hasil kurang maksimal

9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.39.07.09	6	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Pencapaian hasil kurang maksimal
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.39.07.10	8	Sekretaris	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.25.39.07.11	6	Sekretaris	Keterbatasan anggaran	Pencapaian hasil kurang maksimal
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO.25.39.07.12	7	Sekretaris	Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran dalam melaksanakan tugas	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO.25.39.07.13	5	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN dalam memelihara sarana dan prasarana kantor	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah

Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulis kertas kerja sebagai berikut :

<b>Formulir Kertas Kerja</b> Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan							
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:</b>							
1	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.25.39.07.01	Melaksanakan pembentukan desa tangguh bencana setiap tahun	Belum Maksimal	Peningkatan anggaran pembentukan desa tangguh bencana minimal sebanyak 5 desa per tahun dan mengajukan bantuan program ke BPBD Prov Jawa Timur	Kepala Badan	5 Tahun
2	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	RSO.25.39.07.02	Melaksanakan piket tim reaksi cepat (TRC) Bencana	Keterbatasan tim reaksi cepat (TRC)	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kasi trantib kecamatan, sat pol pp, damkar, pu sda dan stake holder terkait dalam penanggulangan bencana	Kepala Badan	1 Tahun
3	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.25.39.07.03	Memberikan bantuan stimulan pasca bencana kepada masyarakat	Belum Maksimal	Mengajukan bantuan pasca bencana kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Kepala Badan	1 Tahun
4	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.39.07.04	Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan setiap tribulanan dalam bentuk rapat dan laporan tribulan	Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Kepala Badan	1 Tahun



**Risiko Operasional OPD Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah:**

1	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.25.39.07.01	Monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kepada masyarakat	Belum Maksimal	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Pejabat Fungsional	1 Tahun
2	Resiko Kemitraan: Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.25.39.07.02	Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana terhadap masyarakat	Belum Maksimal	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun
3	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.25.39.07.03	Melaksanakan pelatihan bagi SDM BPBD	Belum Menyeluruh	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun
4	Resiko Fraud: Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.25.39.07.04	Memberikan bantuan logistik darurat bencana saat kejadian	Belum Maksimal	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Kabid Kedaruratan dan Logistik Bencana	1 Tahun
5	Terhambatnya proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.25.39.07.05	Rapat koordinasi pengumpulan data kerugian dan kerusakan pasca bencana	Belum menyeluruh	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	1 Tahun
6	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.39.07.06	Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu	Terlambatnya penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Melakukan Monev Triwulan	Sekretaris	1 Tahun
7	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.39.07.07	Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban	Adanya temuan terkait SPJ	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Sekretaris	1 Tahun
8	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.39.07.08	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Adanya Dokumen administrasi kepegawaian yang tidak lengkap	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Sekretaris	1 Tahun
9	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.39.07.09	Tersedianya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Keterbatasan SDM	Sosialisasi kepada ASN	Sekretaris	1 Tahun
10	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.39.07.10	Penandatanganan pakta integritas	Belum Maksimal	Melakukan verifikasi berjenjang	Sekretaris	1 Tahun
11	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.25.39.07.11	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Sekretaris	1 Tahun
12	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO.25.39.07.12	Penunjang Kinerja Pegawai	Keterbatasan SDM	Rekrutmen SDM yang memadai	Sekretaris	1 Tahun
13	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO.25.39.07.13	Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai	Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Sekretaris	1 Tahun



## D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko strategis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

### Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2025									
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan										
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:										
1	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.25.39.07.01	-	Kurangnya alokasi anggaran dan komitmen opd dalam pembentukan desa tangguh bencana	Masih banyak desa yang di daerah rawan bencana belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	Peningkatan anggaran pembentukan desa tangguh bencana minimal sebanyak 5 desa per tahun dan mengajukan bantuan program ke BPBD Prov Jawa Timur	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-
2	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	RSO.25.39.07.02	-	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana menurun	-	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kasi trantib kecamatan, sat.pol.pp, damkar, pu sda dan stake holder terkait dalam penanggulangan bencana	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-
3	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.25.39.07.03	-	Kurangnya alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Perhitungan dan bantuan pasca bencana kurang optimal	-	Mengajukan bantuan pasca bencana kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-
4	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.39.07.04	-	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Kurang efektif dan efisiensiya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi	-	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-

Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:										
1	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.25.39.07.01	-	Minimnya anggaran yang dialokasikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana	Layanan penanggulangan bencana yang diterima masyarakat tidak optimal	-	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
2	Resiko Kemitraan: Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.25.39.07.02	-	Banyak masyarakat yang tidak mengetahui daerah rawan bencana	Menurunnya kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	-	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Triwulan I s/d II	Triwulan I s/d II	-
3	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.25.39.07.03	-	Minimnya SDM yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Kurang optimalnya pelaksanaan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat	-	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Triwulan I s/d II	Triwulan I s/d II	-
4	Resiko Fraud: Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.25.39.07.04	-	Keterbatasan sarana dan prasarana respon cepat darurat bencana	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap respon cepat yang dilakukan BPBD	-	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
5	Terhambatnya proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.25.39.07.05	-	Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana	Keterlambatan penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana	-	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Triwulan III s/d IV	Triwulan III s/d IV	-
6	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.39.07.06	-	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar lintas bidang terhadap pelaporan serta movev pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan	Pencapaian pelaporan yang tidak tepat waktu	-	Melakukan Movev Triwulan	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
7	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.39.07.07	-	Kurangnya Pemahaman ASN terkait dokumen laporan pertanggungjawaban	Mempengaruhi Kualitas Laporan Pertanggungjawaban yang kurang lengkap	-	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Triwulan IV	Triwulan IV	-
8	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.39.07.08	-	Kurangnya kesadaran ASN terhadap Dokumen Kepegawaian	Pencapaian hasil kurang maksimal	-	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Triwulan IV	Triwulan IV	-
9	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.39.07.09	-	Keterbatasan SDM	Pencapaian hasil kurang maksimal	-	Sosialisasi kepada ASN	Triwulan IV	Triwulan IV	-
10	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.39.07.10	-	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan	-	Melakukan verifikasi berjenjang	Triwulan IV	Triwulan IV	-
11	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.25.39.07.11	-	Keterbatasan anggaran	Pencapaian hasil kurang maksimal	-	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Triwulan IV	Triwulan IV	-
12	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO.25.39.07.12	-	Kurangnya kedisipinan dan kesadaran dalam melaksanakan tugas	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	-	Rekrutmen SDM yang memadai	Triwulan IV	Triwulan IV	-
13	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO.25.39.07.13	-	Kurangnya kesadaran ASN dalam memelihara sarana dan prasarana kantor	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah	-	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Triwulan IV	Triwulan IV	-

## E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

**Formulir Kertas Kerja**  
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2025						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan							
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada )	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:</b>							
1	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.25.39.07.01	Melaksanakan pembentukan desa tangguh bencana setiap tahun	Belum Maksimal	Peningkatan anggaran pembentukan desa tangguh bencana minimal sebanyak 5 desa per tahun dan mengajukan bantuan program ke BPBD Prov Jawa Timur	Kepala Badan	5 Tahun
2	Belum optimalnya koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	RSO.25.39.07.02	Melaksanakan piket tim reaksi cepat (TRC) Bencana	Keterbatasan tim reaksi cepat (TRC)	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kasi trantib kecamatan, sat pol pp, damkar, pu sda dan stake holder terkait dalam penanggulangan bencana	Kepala Badan	1 Tahun
3	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.25.39.07.03	Memberikan bantuan stimulan pasca bencana kepada masyarakat	Belum Maksimal	Mengajukan bantuan pasca bencana kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Kepala Badan	1 Tahun
4	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.39.07.04	Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan setiap tribulanan dalam bentuk rapat dan laporan tribulan	Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Kepala Badan	1 Tahun

**Risiko Operasional OPD Badan**  
**Penanggulangan Bencana Daerah:**

1	Adanya layanan kepada masyarakat pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana tidak maksimal	ROO.25.39.07.01	Monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kepada masyarakat	Belum Maksimal	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Pejabat Fungsional	1 Tahun
2	Resiko Kemitraan: Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap daerah rawan bencana	ROO.25.39.07.02	Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana terhadap masyarakat	Belum Maksimal	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun
3	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.25.39.07.03	Melaksanakan pelatihan bagi SDM BPBD	Belum Menyeluruh	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun
4	Resiko Fraud: Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.25.39.07.04	Memberikan bantuan logistik darurat bencana saat kejadian	Belum Maksimal	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Kabid Kedaruratan dan Logistik Bencana	1 Tahun
5	Terhambatnya proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.25.39.07.05	Rapat koordinasi pengumpulan data kerugian dan kerusakan pasca bencana	Belum menyeluruh	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	1 Tahun
6	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.39.07.06	Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Tepat Waktu	Terlambatnya penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Melakukan Monev Triwulan	Sekretaris	1 Tahun
7	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO.25.39.07.07	Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban	Adanya temuan terkait SPJ	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Sekretaris	1 Tahun
8	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO.25.39.07.08	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Adanya Dokumen administrasi kepegawaian yang tidak lengkap	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Sekretaris	1 Tahun
9	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.25.39.07.09	Tersedianya Kualitas Layanan Administrasi Umum	Keterbatasan SDM	Sosialisasi kepada ASN	Sekretaris	1 Tahun
10	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.25.39.07.10	Penandatanganan pakta integritas	Belum Maksimal	Melakukan verifikasi berjenjang	Sekretaris	1 Tahun
11	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO.25.39.07.11	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Sekretaris	1 Tahun
12	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO.25.39.07.12	Penunjang Kinerja Pegawai	Keterbatasan SDM	Rekrutmen SDM yang memadai	Sekretaris	1 Tahun
13	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO.25.39.07.13	Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai	Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Sekretaris	1 Tahun

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Kesuksesan Pengendalian risiko strategis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke dalam matriks sebagai berikut:

## Tabel Rancangan Infokom

### Formulir Kertas Kerja

Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:</b>							
1	Peningkatan anggaran pembentukan desa tangguh bencana minimal sebanyak 5 desa per tahun dan mengajukan bantuan program ke BPBD Prov Jawa Timur	Rapat Koordinasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	SMasyarakat dan OPD Terkait	Setiap Tahun	Setiap Tahun	-
2	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kasi trantib kecamatan, sat pol pp, damkar, pu sda dan stake holder terkait dalam penanggulangan bencana	Sosialisasi	Kabid Kedaruratan dan Logistik Bencana	Masyarakat dan OPD Terkait	Triwulan I s/d II	Triwulan I s/d II	-
3	Mengajukan bantuan pasca bencana kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Koordinasi	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Masyarakat dan OPD Terkait	Triwulan III s/d IV	Triwulan III s/d IV	-
4	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Rapat Koordinasi	Sekretaris	Seluruh Bidang	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



**Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:**

1	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Koordinasi	Seluruh Bidang	Masyarakat dan OPD Terkait	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
2	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Sosialisasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Masyarakat	Triwulan I s/d II	Triwulan I s/d II	-
3	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Koordinasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seluruh Pegawai	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
4	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Koordinasi	Kabid Kedaruratan dan Logistik Bencana	Seluruh Pegawai	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
5	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Rapat Koordinasi	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Masyarakat dan OPD Terkait	Triwulan III s/d IV	Triwulan III s/d IV	-
6	Melakukan Monev Triwulan	Rapat Koordinasi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Seluruh Pegawai	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
7	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Koordinasi	Inspektorat	Perangkat Daerah dan seluruh ASN	Triwulan IV	Triwulan IV	-
8	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Sosialisasi/Bimtek	Kasubag Umum dan Kepegawaian, BKPSDM	Perangkat Daerah dan seluruh ASN	Triwulan IV	Triwulan IV	-
9	Sosialisasi kepada ASN	Koordinasi	BKPSDM	Perangkat Daerah dan seluruh ASN	Triwulan IV	Triwulan IV	-
10	Melakukan verifikasi berjenjang	Sosialisasi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh Pegawai	Triwulan IV	Triwulan IV	-
11	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Koordinasi	BPKAD	Perangkat Daerah dan PPTK	Triwulan IV	Triwulan IV	-
12	Rekrutmen SDM yang memadai	Koordinasi	BKPSDM & BPKAD	Perangkat Daerah	Triwulan IV	Triwulan IV	-
13	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Koordinasi	Bidang Aset BPKAD	Perangkat Daerah	Triwulan IV	Triwulan IV	-

## **BAB V**

### **RANCANGAN PEMANTAUAN**

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu factor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :



Tabel Rancangan Pemantauan

**Formulir Kertas Kerja**  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	
Dinas Terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:</b>						
1	Peningkatan anggaran pembentukan desa tangguh bencana minimal sebanyak 5 desa per tahun dan mengajukan bantuan program ke BPBD Prov Jawa Timur	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-
2	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kasi trantib kecamatan, sat pol pp, damkar, pu sda dan stake holder terkait dalam penanggulangan bencana	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-
3	Mengajukan bantuan pasca bencana kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-
4	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Reviu hasil money kinerja internal	Kepala Badan	Triwulan I s/d IV Tahun	Triwulan I s/d IV Tahun	-

Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:						
1	Meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dan mendorong peran serta masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
2	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Triwulan I s/d II	Triwulan I s/d II	-
3	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Triwulan I s/d II	Triwulan I s/d II	-
4	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Kedaruratan dan Logistik Bencana	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
5	Membentuk TIM Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang beranggotakan opd terkait	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Triwulan III s/d IV	Triwulan III s/d IV	-
6	Melakukan Monev Triwulan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan I s/d IV	Triwulan I s/d IV	-
7	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan IV	Triwulan IV	-
8	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan IV	Triwulan IV	-
9	Sosialisasi kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan IV	Triwulan IV	-
10	Melakukan verifikasi berjenjang	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan IV	Triwulan IV	-
11	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan IV	Triwulan IV	-
12	Rekrutmen SDM yang memadai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan IV	Triwulan IV	-
13	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan IV	Triwulan IV	-

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa . Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Plt. KALAKSA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN



**JOKO RAHARTO, S.STP., M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780514 199711 1 001